

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Investasi atau penanaman modal merupakan instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di suatu negara atau wilayah. Karena pada dasarnya, investasi merupakan satu pengeluaran demi terselenggaranya suatu kegiatan, yang pada akhirnya menghasilkan barang atau jasa. Bentuk dari pengeluaran tersebut dapat berupa pengeluaran dalam berbagai macam hal, seperti pengeluaran untuk pembangunan pabrik, pembelian tanah, pembelian alat-alat produksi, dan dan lain sebagainya (Suparmono, 2004).

setiap negara biasanya menciptakan iklim yang mampu menumbuhkan atau menggairahkan investasi, hal ini dilakukan demi upaya menumbuhkan perekonomian yang ada di negara atau wilayah tersebut. Investor yang menjadi sasaran bukan hanya berasal dari kalangan swasta saja, namun juga para investor asing (Dumairy, 1997). Penanaman modal asing (PMA) merupakan pemindahan modal dari suatu negara ke negara lain. Tujuan pemindahan modal ini digunakan agar dapat menghasilkan keuntungan, dan tetap berada dibawah pengawasan dari para investor asing, baik total maupun sebagian (Salim dan Budi, 2008: 149).

Modal yang dialirkan dari negara satu ke negara lainnya dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi, dan juga

lebih produktif, yang hasilnya nanti diharapkan dari aliran modal internasional atau modal asing ini adalah untuk meningkatkan output dan kesejahteraan di suatu negara. Selain peningkatan input dan output, manfaat dari aliran modal asing bagi negara tujuan adalah sebagai berikut :

1. Penanaman Modal Asing (PMA) membawa teknologi yang lebih mutakhir. Investasi asing yang masuk akan diikuti dengan pengadaan teknologi yang terbaharui atau lebih mutakhir, yang nantinya akan berdampak atau mempengaruhi besar kecilnya keuntungan bagi negara tujuan.
2. Penanaman Modal Asing (PMA) meningkatkan daya saing di negara tujuan. adanya perusahaan baru yang masuk, terutama pada sektor yang tidak diperdagangkan (*nontradable sector*), dapat meningkatkan output industri sehingga berdampak pada harga domestik yang menurun, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.
3. Penanaman Modal Asing (PMA) dapat mengatasi masalah *investment gap* atau biasa dikenal dengan kesenjangan nilai tukar, dengan negara tujuan. Adanya investasi asing atau penanaman modal asing (PMA) dapat mengatasi masalah ini dengan tercukupinya valuta asing dalam pembiayaan impor faktor produksi.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang besar, sehingga membutuhkan dana yang tidak sedikit demi terlaksananya pembangunan. Seperti yang diketahui Indonesia adalah negara

berkembang yang memiliki kapasitas sumber daya yang melimpah, baik itu sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya. Oleh sebab itu, dengan melimpahnya sumber daya yang tersedia ini dibutuhkan modal atau dana sebagai salah satu faktor untuk mengelola sumber daya tersebut, yang tujuan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia itu sendiri.

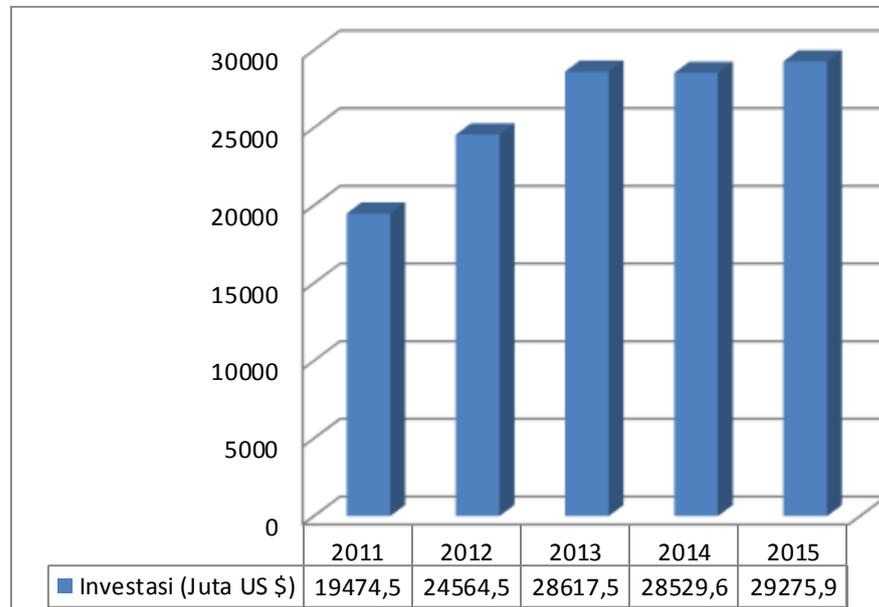
Kebutuhan dana atau modal yang besar ini juga terjadi dalam upaya Indonesia untuk mengejar negara-negara yang berada di kawasan global, khususnya yang berada di kawasan regional dari ketertinggalannya dalam berbagai aspek. Dalam mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia, dibutuhkan dana atau modal untuk meningkatkan potensi sumber daya pada masing-masing daerah, selain mencari sumber pembiayaan yang berasal dari dalam negeri, pemerintah juga mengundang para investor asing yang memiliki sumber pembiayaan tambahan yang berasal dari luar negeri.

Adanya krisis tahun 1997 menyebabkan kemampuan keuangan pemerintah pusat dalam upaya pembiayaan pembangunan terganggu dan bahkan terus menurun. Turunnya kemampuan keuangan pemerintah pusat ini diperparah mengingat keadaan perekonomian Indonesia pada saat itu sangat membutuhkan biaya atau dana investasi yang besar untuk melakukan pembangunan ekonomi baik itu dalam pemulihan krisis maupun pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang ada.

Pasca krisis yang melanda pada tahun 1998, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk terus menggiatkan atau menggairahkan investasi yang ada di Indonesia terutama dalam penanaman modal asing (PMA), melalui kebijakan makro ekonomi secara hati-hati untuk memelihara momentum stabilitas ekonomi, meningkatkan kinerja ekspor dan investasi. Hal ini dapat dilihat dengan terbentuknya tim nasional peningkatan ekspor dan peningkatan investasi pada Keputusan Presiden No.87 tahun 2003. Selain itu, pemerintah juga sudah melakukan upaya untuk menggairahkan investasi di Indonesia dengan kembali mengeluarkan berbagai kebijakan struktural yang diarahkan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, membentuk infrastruktur yang kuat, dan meningkatkan daya dukung pada sektor keuangan bagi perekonomian nasional.

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan untuk dapat menggairahkan investasi asing di Indonesia dari tahun 2011- 2015, keadaan investasi asing di Indonesia terus berfluktuasi, walaupun cenderung meningkat namun pada tahun tertentu, PMA di Indonesia mengalami sedikit kelesuan atau penurunan.

Gambar 1.1
Nilai (PMA) Penanaman modal Asing (Juta US \$), Tahun 2011-2015



Sumber: Badan Pusat Statistika Provinsi DIY, 2016

Grafik 1.1 menunjukkan keadaan penanaman modal asing (PMA) di Indonesia dalam kurun waktu 2011-2015. Selama periode tersebut, penanaman modal asing di Indonesia terus meningkat. Pada tahun 2012, PMA mengalami kenaikan sebesar 5.090,2 juta US\$ dari tahun sebelumnya dan kembali mengalami kenaikan sebesar 4.052,8 juta US\$ pada tahun berikutnya, meskipun pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 87,8 juta US\$, namun pada tahun 2015 PMA di Indonesia kembali mengalami kenaikan sebesar 746,2 juta US \$.

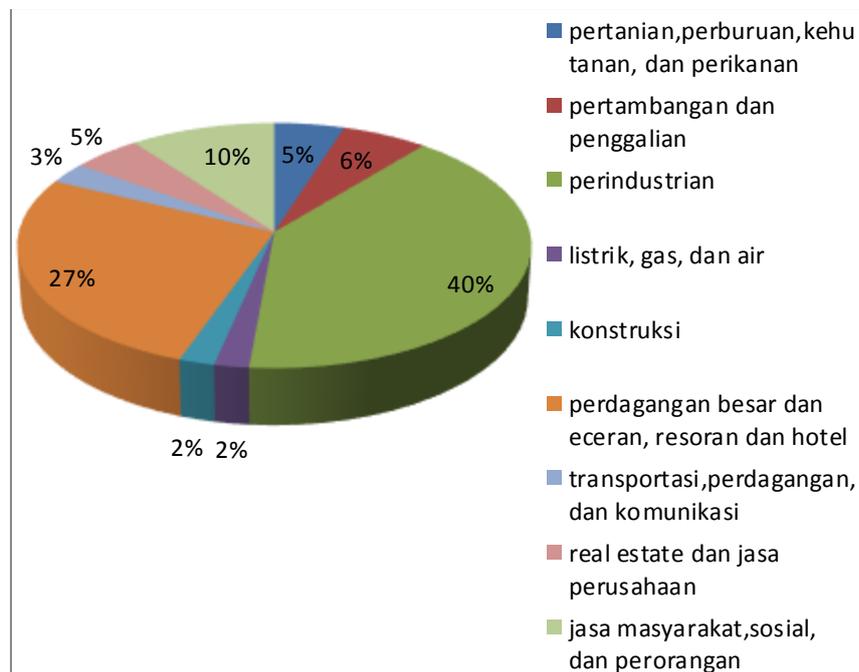
Indonesia memiliki potensi yang sangat besar sehingga dapat menarik investor asing untuk berinvestasi di Indonesia, baik dari sudut pandang permintaan maupun dari sudut pandang penawaran. Dari sudut pandang permintaan, ada beberapa faktor yang mampu mempengaruhi

investor asing untuk berinvestasi di Indonesia, yakni jumlah penduduk, di mana menurut Adam Smith jumlah penduduk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di suatu wilayah. Meningkatnya jumlah penduduk akan memperluas pangsa pasar dan dengan luasnya pangsa pasar yang tersedia akan berdampak pada tingginya tingkat spesialisasi dalam perekonomian (Irawan, 2002:23). Dengan terciptanya pertumbuhan ekonomi, akumulasi modal nantinya dibutuhkan dalam menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi. Selain itu faktor yang dapat mempengaruhi PMA adalah pendapatan riil per kapita. Kedua faktor ini dianggap dapat mempengaruhi besar-kecilnya potensi pasar yang dimiliki Indonesia dari sisi permintaan, yang berarti juga mempengaruhi besar-kecilnya keuntungan yang didapatkan oleh para investor nantinya. Dilihat dari banyaknya jumlah penduduk, Indonesia dapat dibandingkan dengan negara-negara maju seperti China, yang mana memiliki potensi pasar yang sangat besar. Di mata para investor hal ini menjadi salah satu faktor yang dapat menarik minatnya untuk menanamkan modalnya di negara tersebut. Namun memiliki jumlah penduduk yang banyak saja tidaklah cukup apabila pendapatan rata-rata yang dimiliki orang Indonesia masih kecil, hal ini dapat dilihat dari kemampuan daya beli masyarakat Indonesia itu sendiri.

Dari sudut pandang penawaran pun, harus dibedakan potensi yang dimiliki Indonesia, antara potensi jangka pendek dan potensi jangka panjang. Seperti yang diketahui potensi jangka pendek yang dimiliki

Indonesia dari segi sumber daya alamnya yang melimpah, dalam hal ini komoditas pertanian, jumlah tenaga kerja yang besar, dan komoditas pertambangan termasuk didalamnya.

Gambar 1.2
Realisasi (PMA) Penanaman Modal Asing di Indonesia Menurut Sektor (Proyek), Tahun 2015



Sumber: Badan Pusat Statistika Provinsi DIY, 2016

Diagram 1.2 menunjukkan persentase realisasi dari beberapa sektor yang menjadi sasaran para investor asing dalam berinvestasi, sehingga nantinya dapat menggambarkan seberapa besar peranan dari sektor tersebut dalam mendukung atau menunjang perekonomian yang ada di Indonesia.

Pada tahun 2015, bentuk investasi yang dilakukan para investor asing di Indonesia didominasi oleh tiga sektor, yaitu sektor perindustrian,

perdagangan besar dan eceran, hotel, restoran, serta jasa masyarakat, sosial dan perumahan. Sektor industri di Indonesia sangat dilirik oleh para investor asing di Indonesia. Terbukti besarnya investasi asing dalam bentuk atau sektor industri dari Diagram 1.2 di atas sebesar 40% atau sebanyak 7.184 proyek dari total 17.738 proyek yang ada pada tahun 2015, diikuti dengan sektor perdagangan besar dan eceran, restoran dan hotel sebesar 27% atau sebanyak 4.757 proyek, serta sektor jasa masyarakat, sosial dan perumahan dengan persentase sebesar 10% atau sebanyak 1.804 proyek.

Selain potensi jangka pendek yang dimiliki, Indonesia juga memiliki potensi jangka panjang, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusianya (SDM) dan teknologi yang terus dikembangkan. Pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia ini terlihat dari banyaknya sarana pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia dan berbagai peraturan yang mengarah pada perbaikan dan peningkatan kualitas SDM atau sumber daya manusia yang ada di Indonesia.

Apabila potensi jangka panjang yang dimiliki Indonesia ini tidak dapat dilaksanakan, sertaberbagai persoalan yang tidak segera diatasi, seperti buruknya daya saing Indonesia, stabilitas politik, ekonomi dan sosial yang selalu goyah, permasalahan kondisi infrastruktur dasar (prasarana jalan, telekomunikasi, dan listrik) yang dapat mempengaruhi dalam hal efisiensi transportasi dan distribusi, regulasi yang tidak jelas, permasalahan perpajakan, birokrasi (dalam waktu dan biaya yang diciptakan),

konsistensi dan kepastian dalam kebijakan pemerintah tidak tuntas, maka akan berdampak pada hilangnya potensi jangka pendek yang dimiliki Indonesia. Sebagai contoh, salah satu permasalahan dalam hal tenaga kerja di Indonesia adalah kualitas tenaga kerja yang rendah dilihat dari etos kerjanya. Keunggulan yang dimiliki Indonesia salah satunya adalah upah pekerjanya murah. Namun potensi atau keunggulan ini tidak bisa terus diandalkan apabila tidak diikuti dengan kualitas pekerja yang baik.

Dengan terus berkembangnya zaman, persaingan yang ada akan semakin ketat. Hal ini akibat dari banyaknya pemain baru yang bermunculan di pasar ditambah lagi dengan semakin agresifnya produksi global, selain itu dengan penerapan berbagai macam standarisasi yang semakin ketat pada hal yang berkaitan dengan keselamatan konsumen dan lingkungan. Seharusnya, upah buruh yang murah di Indonesia masih bisa diandalkan apabila tingginya kualitas tenaga kerja yang dimiliki. Karena upah pekerja yang murah dianggap tidak menarik dan tidak berarti, apabila kualitas yang dihasilkan buruk dan produktivitasnya rendah. Selain itu faktor kualitas infrastruktur juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya tarik Indonesia di mata para investor terutama para investor asing.

Sejak tahun 2000 kebijakan otonomi daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan terus melakukan pembangunan secara merata dan adil dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan agar sesuai

dengan tujuan pembangunan nasional itu sendiri. Indeks Kemalahan Konstruksi (IKK) merupakan salah satu komponen dalam realisasi kebijakan otonomi daerah tersebut, karena IKK dapat digunakan untuk mengukur keadaan geografis yang ada di suatu wilayah, tingginya harga di suatu daerah sulitnya letak geografis daerah tersebut. tingginya tingkat harga di daerah tersebut termasuk tingkat harga konstruksi, dan kenaikan harga konstruksi ini akan berdampak pada menurunnya jumlah investasi asing (PMA), karena dengan meningkatnya harga konstruksi maka biaya produksi akan ikut meningkat dan hal ini sangat di hindari oleh para investor terutama investor asing.

Pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan terus memperbaiki dan meningkatkan berbagai kualitas infrastruktur yang ada, sehingga kualitas infrastruktur ini ditempatkan pada sektor vital dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan infrastruktur sempat mengalami penurunan yang cukup signifikan akibat depresiasi rupiah saat terjadi krisis ekonomi 1997/1998. Seperti yang diketahui bahwa ketika suatu negara terkena krisis ekonomi yang dalam hal ini adalah Indonesia, maka alokasi Infrastruktur adalah salah satu hal yang harus di korbakan, karena perhatian utama pemerintah pada waktu itu hanya fokus pada pembenahan kebijakan moneter sehingga pembangunan infrastruktur menjadi terhambat bahkan justru stagnan.

Pembangunan infrastruktur sendiri diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perekonomian yang ada di suatu wilayah, seperti perbaikan kinerja transportasi, pemerataan infrastruktur dalam hal energi, dimana hal ini merupakan salah satu cara agar dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian suatu wilayah. Pemerataan dengan pengadaan infrastruktur energi dalam hal ini infrastruktur listrik dapat meningkatkan produktifitas. Penggunaan teknologi di zaman sekarang dilakukan agar dapat melakukan segala kegiatan termasuk kegiatan produksi dan distribusi agar lebih cepat dan efisien. Dengan digunakannya teknologi maka di butuhkanlah energi yang cukup untuk dapat menjalankannya. Namun apabila ketersediaan infrastruktur listrik terbatas atau bahkan tidak ada, maka untuk dapat menjalankan atau menggunakan teknologi dalam hal produksi atau distribusi tadi memerlukan biaya tambahan sehingga nantinya akan berdampak pada pendapatan yang di hasilkan, dan ketersediaan infrastruktur listrik ini akan berpengaruh pada minat investor yang dalam hal ini investor asing untuk menanamkan modalnya distribusi barang dan tentunya akan berdampak pada daya saing.

Tabel 1.1
Peringkat Daya Saing Negara ASEAN Tahun 2016

Negara	Peringkat (2016)	Skor (1-7)
Singapore	2	5,81
Malaysia	25	5,16
Thailand	34	4,64
Indonesia	41	4,52
Philippines	57	4,36

Brunei Darussalam	58	4,35
Vietnam	60	4,31
Camboja	89	3,98
Laos	93	3,93
Myanmar	131	-

Sumber : WEF (2016)

Oleh sebab itu, saat ini pemerintah Indonesia terus berupaya membenahi dan terus meningkatkan pembangunan infrastruktur. Hal ini dapat terlihat dengan memberikannya kompensasi dalam bentuk kerja sama investasi, subsidi, garansi, dan penghapusan pajak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2005 pada proyek-proyek infrastruktur yang sudah melewati proses seleksi yang dilakukan oleh KKPPI (Komite & Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur) serta Komite Pengelolaan Resiko Departemen Keuangan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengamati faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini dinilai sangat penting agar permasalahan yang dibahas tidak mengalami perluasan pembahasan. Ada pun batasan tersebut adalah :

1. Topik yang diteliti adalah Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia pada tahun 2011-2015, untuk 33 Provinsi di Indonesia.

2. Pemilihan tahun 2011 sebagai tahun awal penelitian, karena adanya Peraturan Presiden No 36 tahun 2010 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.
3. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah penanaman modal asing (PMA) sebagai variabel dependen, sedangkan Upah Minimum Regional (UMR), infrastruktur listrik, jumlah penduduk, dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) sebagai variabel independen.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Regional (UMR) terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia pada periode 2011-2015?
2. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia pada periode 2011-2015?
3. Bagaimana pengaruh Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia pada periode 2011-2015?
4. Bagaimana pengaruh Infrastruktur listrik terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia pada periode 2011-2015?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Regional (UMR) terhadap penanaman modal asing (PMA) di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Kemahalan Konstruksi terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh infrastruktur listrik terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis penelitian ini digunakan sebagai sarana implementasi dari ilmu pengetahuan yang telah didapat selama berada di bangku perkuliahan.
2. Sebagai bahan informasi dan bahan studi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan investasi atau penanaman modal.
3. Bagi pemerintah terutama Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM), penelitian ini memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penanaman modal asing di Indonesia

sehingga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan, terutama terkait dengan PMA.